

Rasionalitas Publik, Kegilaan Elite

Teuku Kemal Fasya

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menggambarkan tentang realitas sosiologi politik pascapilpres. Rilis survei itu memberikan gambaran kontradiktif antara daya terima publik atas hasil pilpres dan penolakan elite politik pro Prabowo - Hatta yang kini menggugat pilpres di Mahkamah Konstitusi dan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rilis survei 7 Agustus lalu itu memperlihatkan bahwa sebagian besar publik (67,49 persen) memercayai hasil pemilihan presiden 9 Juli 2014. Mereka meyakini Joko Widodo - Jusuf Kalla telah menang dalam pilpres yang demokratis. Hanya 18,52 persen meyakini hasil pilpres lalu curang. Bahkan, sebagian besar pendukung muslim yang sebelumnya berada di belakang Prabowo - Hatta (52,01 persen) kini beralih ke kubu Jokowi - JK. Kini dukungan pendukung muslim ke Prabowo - Hatta hanya 34 persen.

Pandangan publik terhadap elite tecermin melalui sikap mereka terhadap MK. Publik menganggap pertengkaran pascaputusan MK sangat tidak bermanfaat bagi perkembangan politik nasional. Mayoritas warganegara Indonesia merasa lelah dengan perselisihan politik pascapilpres. Mereka menginginkan semua masalah perselisihan selesai pascaputusan MK nanti (78,11 persen).

Kontradiksi Rasionalitas Politik

Realitas publik inilah yang gagal dipahami oleh kubu Prabowo - Hatta. Mayoritas rasionalitas politik publik Indonesia masih sehat dan tidak tercemar oleh permainan politik elite melalui media dan aksi massa. Mata publik tidak dapat ditutupi orkestra sumbang kelompok kalah atas hasil pilpres.

Kubu Prabowo - Hatta gagal menangkap suara batin publik itu. Mereka tidak memahami bahwa perbedaan budaya, etnis, agama yang beragam di Indonesia termasuk geopolitik yang ekstrem sebelum pilpres, tidak menjadi anarkhisme dan kekerasan massif yang menolak hasil 9 Juli pasca penetapan oleh KPU 22 Juli lalu. Publik mengakui bahwa pertarungan politik telah usai. Kekalahan harus diterima. *The game is over!*

Namun kini publik kembali disugui irasionalitas politik melalui gugatan di MK dan DKPP. Para saksi yang digunakan untuk membuktikan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) oleh Komisi Pemilihan Umum gagal tampil dengan dokumen dan bukti formal. Bahkan akhirnya sidang di MK menjadi dagelan politik yang memalukan karena sebagian besar

saksi hanya menggunakan asumsinya dan menjadi sosok yang serba “tidak tahu” dan “tidak melihat” kecurangan setelah disumpah. Kebanyakan saksi adalah orang yang hanya mendengar rumor atau cerita orang lain dan tidak melihat dengan mata-kepala sendiri terkait tuduhan kecurangan itu (*Testimonium De Auditu*).

Kita akhirnya melihat akting Novela Nawipa tentang tidak dilakukannya pemilihan di Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua sebagai wujud *stand up comedy* paling garing dan tidak lucu. Ketidakberhasilan meyakinkan majelis hakim itu menjadi olok-olok di media massa dan sosial, menunjukkan ada yang janggal dengan keluguan artifisial itu. Terbukti ia bukan saksi yang netral. Ia pengurus partai politik pendukung Prabowo. Kesaksiannya di sidang MK bukan untuk menyampaikan kebenaran faktual tapi ekspresi memenuhi panggung politik. *Political dramaturgy*.

Demikian pula kesaksian Dadi Waluyo tentang kecurangan pilpres menjadi kesaksian yang dipaksakan jika tak ingin disebut palsu. Bahkan kini telah muncul beberapa analisis bahwa kedua saksi itu sedang berbohong tentang kecurangan pilpres, yang tentu akan menghadapi konsekuensi hukum lain.

Pernyataannya, berapa banyak orang seperti Novela dan Dadi? Tidak begitu banyak, bahkan sedikit warga politik di Indonesia yang mau menjadi contoh buruk dan olok-olok nasional. Tidak banyak meskipun tidak dapat dikatakan sangat sedikit publik yang bersedia menukar harga diri dengan tindakan “bunuh diri” seperti itu. Rasionalitas yang membenarkan aksi tersebut adalah karena mereka “tentara bayaran”. Mereka bukan sosok yang tergerak oleh kesukarelaan atas dasar idealisme dan ideologi politik. Kepentingannya hanya atas dasar hedonistis dan egoistis.

Kegilaan Elite

Berbanding terbalik dengan perilaku sebagian besar publik yang bisa menerima realitas politik pascakekalahan, elite pendukung Prabowo – Hatta masih delusif melihat hasil pilpres.

Melalui media kita bisa menilai sikap elite-elite nomor urut satu di Rumah Polonia ketika berpenampilan seolah-olah menang walaupun hasil *quick count* kredibel mengumumkan Jokowi – JK pemenangnya. Untungnya mereka memiliki beberapa “lembaga survei abal-abal” seperti Puspaktis dkk, sehingga masih mungkin mementaskan “drama kegembiraan”. Kegembiraan melalui sujud syukur terlihat sangat dibuat-buat. Saya memerhatikan dengan seksama ekspresi para pendukung Prabowo ketika harus bersorak kemenangan pascapidato Prabowo. Ekspresi wajah

tidak bisa ditipu. Mereka tidak yakin dengan permainan visual kompleks dan drama itu. Subkesadaran tidak bisa terkelupas oleh lipstik penampilan.

Puncaknya adalah pidato Prabowo di sidang MK 6 Agustus lalu. Semua orang bisa membaca ketidakstabilan psikologi Prabowo ketika mengungkapkan totaliterisme, fasisme, komunisme, tuduhan kudeta kepada dirinya, buruknya demokrasi Indonesia seumpama Korea Utara, upayanya membesarkan Partai Gerindra dari nol, dll.

Kita bisa melihat gestur, pilihan kalimat, cara pengungkapan, dan nada suara Prabowo mengombinasikan sikap marah, kecewa, sedih, putus-asa, dan narsistis. Selaksa gambar juga memperlihatkan bagaimana ekspresi barisan pendukung Prabowo seperti Amin Rais, Aburizal Bakri, Akbar Tanjung, Fadli Zon, dan kuasa hukum dengan ekspresi datar; tanda bahwa banyak hal yang mungkin tidak disetujui dari pidato yang tidak berkoneksi langsung dengan pengungkapan “pilpres curang” itu.

Gambaran *schizophrenia* elite ini berbahaya bagi demokrasi. Sangat sulit menghadapi elite politik yang mengalami gangguan mental dan pikiran (*mental and mind disorder*), sehingga tidak bisa melihat secara objektif lingkungan sekitarnya. Ia hanya berpatokan kepada suara batin dan keyakinan palsu yang tak berhubungan dengan rasionalitas dan etika publik.

Melihat realitas ini, secara psikologis saya melihat Prabowo sulit memahami bahwa kontestasi seperti pilpres ini adalah proses yang pasti berujung kemenangan dan kekalahan. Keduanya harus bisa disikapi dengan dewasa: tidak jumawa ketika menang dan tidak marah ketika kalah.

Pilpres bukan pertandingan sepakbola kampung, dimana hanya ada keagungan dan kehebatan diri sendiri (megalomaniak), menolak kekalahan karena dianggap aib, dan mencari kambing hitam kepada lawan. Pada titik ini ia terlihat sedang berhalusinasi tentang dukungan yang besar. Halusinasi bertambah dengan teriakan kemenangan, klaim kebenaran, pamflet keagungan kepada *Der Kaiser* dari tim sukses tanpa pernah sekalipun menginterupsi kesalahan dan kelemahannya.

Kini, Prabowo sedang dijorok ke sudut sempit nan gelap oleh pendukungnya, kaum yang hanya mengharapkan keuntungan politis-ekonomis dan bukan kebaikan demokrasi. Pada akhirnya, setelah demonstrasi senyap, sorak-sorai hilang, media tak lagi menarik meliput pandangannya, ketika kebohongan dan retorika tidak lagi tegak, ia akan merasa sendiri. Sepi-membatu dan melihat gambaran palsu tentang dirinya.

www.siperubahan.com, 14 Agustus 2014.